



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADE SAEPUDIN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 154642

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.635.000.000**

1. Tanah Seluas 395 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, WARISAN
Rp. 410.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/250 m2 di KAB / KOTA
MAJALENGKA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 950.000.000
3. Tanah Seluas 209 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, WARISAN
Rp. 240.000.000
4. Tanah Seluas 728 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL
SENDIRI Rp. 35.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **230.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA TRUCK Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
70.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
160.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **1.000.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **105.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **2.970.000.000**

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **2.970.000.000**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.